

Rp. 12,50

P.I.R. 821/82 — 10.000 ex.

**MENANGGULANGI
KESULITAN2**

EKONOMI

**DENGAN
SEMANGAT
TRIKORA**

Depagitprop CC PKI

**Menanggulangi
Kesulitan² Ekonomi
Dengan Semangat Trikora**



**Depagitprop CC PKI
Djakarta 1962**

Katapengantar

Menjambut pernyataan Presiden Sukarno dalam pidato *Tahun Kemenangan*, 17 Agustus 1962, yang a.l. menundukkan kesanggupan untuk mengatasi kesulitan² persoalan ekonomi, Pernyataan Politbiro CC PKI *Madju Terus dengan Semangat Trikora menanggulangi Soal Ekonomi* ! tidak hanya merupakan sumbangan pikiran dalam perjuangan untuk menanggulangi soal² ekonomi, tapi juga merupakan konsepsi revolusioner dalam melawan musuh² Rakjat dibidang ekonomi, khususnja kaum kapitalis birokrat.

Pernyataan Politbiro CC PKI tersebut telah disambut dengan perasaan lega sebagai senjata ditangan Rakjat dan telah menimbulkan perhatian serius dikalangan mereka yang berkemauan sungguh² dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan mereka yang berketjimpung dilapangan ini.

Penerbitan brosur ini yang berjudjul *Menanggulangi kesulitan² Ekonomi dengan Semangat Trikora* dan memuat Pernyataan Politbiro CC PKI itu selengkapnja, beserta polemik antara Redaktur Ekonomi *Harian Rakjat* dan *Business News*, hendaknja dapat memberi sumbangan lebih lanjut dalam perjuangan untuk mendobrak *salahurus* (mismanagement) dibidang ekonomi dan dapat menjadi pegangan bagi para aktivisnja.

Dep. Agitprop CC PKI

Djakarta, Desember 1962.

rentjana kulit :

nugroho

PERNJATAAN POLITBIRO CC PKI :

MADJU TERUS DENGAN SEMANGAT TRIKORA MENANGGULANGI SOAL EKONOMI!

Dalam pidato 17 Agustus 1962, yaitu pidato *Tahun Kemenangan*, Presiden Sukarno antara lain menyatakan, bahwa setelah soal keamanan dan Irian Barat boleh dikatakan sudah selesai, maka beliau merasa sanggup untuk mengatasi kesulitan² persoalan ekonomi dalam waktu pendek, dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Politburo Komite Central Partai Komunis Indonesia menjambut pernyataan Presiden Sukarno ini, telah ikut memikirkan se-dalam²nja tjara² merealisasi 'perasaan sanggup yang wajar ini, dan dengan ini menjumbangkan fikirannya dalam bentuk pernyataan sbb. :

Dalam melaksanakan seruan Presiden Sukarno untuk mengadakan konfrontasi disegala bidang, khususnya di bidang ekonomi, kekuatan² nasional harus dikerahkan berdasarkan prinsip gegotong-rojongan nasional yang berporoskan Nasakom. Dibawah sembojan „*Satu tangan pegang bedil dan satu tangan lagi pegang patjul*” kaum Komunis ber-sama² dengan seluruh Rakjat harus terus „dalam stelling” dan bertjantjut-taliwondo untuk menjegah semakin parahnya keadaan ekonomi yang sangat memberatkan penghidupan Rakjat.

Sebaliknya, mereka yang sudah berketjukupan hidupnya, apalagi mereka yang menarik keuntungan dari krisis ekonomi sekarang banjak yang dengan seenaknya sadja menjerukan supaya „Rakjat berkorban lebih banjak lagi”. Mereka mengemukakan alasan² se-akan² kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang adalah wajar, karena pemulihan keamanan dan perdjuaan pembebasan Irian Barat, karena Trikora. Mereka tidak mau tahu

bahwa ada orang² yang dikenal oleh Rakjat sebagai Orang Kaja Baru (OKB), jaitu orang² yang kaja mendadak setjara tidak wadjar dengan djalan menjalahgunakan kedudukan dan mengadakan manipulasi atas kerugian puluhan djuta Rakjat pekerdja yang bertambah miskin. Mereka adalah apa yang dikatakan dalam Pidato Tahun Kemenangan Presiden Sukarno: „golongan-golongan yang selalu mentjari keuntungan dari keadaan inflasi, atau dengan sengaja mendjalankan subversi ekonomi untuk menjulit-njulikan dan mendjegaldjegal segala gerak-gerik Republik atau pimpinan Republik”.

Mereka sengaja menutup mata terhadap kenyataan, bahwa krisis ekonomi sekarang telah membawa akibat yang sangat merusak dan menjedihkan bagi Rakjat. *Satu gedjala yang serius adalah makin membubungnja harga barang² kebutuhan pokok dengan lompatan² yang sangat tinggi dan dalam waktu² yang sangat pendek. Dengan begitu Rakjat pekerdja yang terdiri dari kaum buruh, tani, nelajan, pegawai, pradjurit, penduduk miskin kota, pedagang dan produsen ketjil serta golongan penerima upah lainnja, mengalami kenaikan ongkos hidup setjara luarbiasa dan kemerosotan daja-belinja yang sangat tjepat. Bahkan pengusaha² nasional disektor produksi, chususnja dibidang industri, terus-menerus terantjam oleh kebangkrutan dan sebagai akibatnja pengangguran bertambah luas.*

Beberapa fakta sosial dan ekonomi dibawah ini kiranya tjukup untuk mejakinkan betapa tidak lajaknja untuk bersikap atjuh-tak-atjuh terhadap keadaan ekonomi sekarang. Berdasarkan keterangan Pemerintah sendiri, indeks biaja hidup di Djakarta pada achir tahun 1961 telah naik mendjadi 170% dan pada achir bulan Maret tahun 1962 melontjat mendjadi 325% dibandingkan dengan achir tahun 1960. Indeks harga barang² konsumsi se-hari² pada achir tahun 1960 adalah 388 dan pada bulan Maret tahun 1962 sudah mendjadi 1261 berdasarkan angka indeks tahun 1953 sama dengan 100. Perkembangan yang serupa djuga berlaku di-kota²

lain, malahan sangat mungkin keadaannja lebih djelek lagi. Pembagian beras sebagai bahan kebutuhan Rakjat yang terpokok praktis hanya diibukota Djakarta sadja yang dapat dikatakan agak lantjar. Dalam kenjataanja penghidupan Rakjat pekerdja adalah djauh lebih berat daripada yang digambarkan didalam keterangan Pemerintah didepan DPRGR beberapa bulan yang lalu, meskipun keterangan Pemerintah itu sendiri sudah tjukup menundjukkan bahwa daja-beli Rakjat pekerdja dalam satu setengah tahun sadja sudah sangat merosot. Kenaikan² upah kaum buruh dengan rata² 30% samasekali tidak dapat mengangkat kaum buruh dari kemiskinan yang makin bertambah. Lebih² keadaan dimana harga barang² pokok setjara resmi dinaikkan sampai lebih dari 100% seperti harga gula, beras dan lain² yang mendorong bertambah naiknja harga dipasar bebas.

Beban hidup kaum tani djuga bertambah berat. Gedjala busunglapar sudah nampak diberbagai tempat dan tidak terbatas pada daerah² yang minus sadja. Harga beras didaerah penghasil beras diwaktu panen tetap tinggi dan bergerak antara Rp. 20.— sampai Rp. 30.— yang sangat memberatkan kaum buruhtani dan tanimiskin sebagai konsumen terbesar di-desa². *Sumber pokok daripada kemiskinan dikalangan kaum tani ini adalah tidak lain daripada masih adanja sisa² penghisapan feodal dan tidak lantjarnja pelaksanaan UUU Perdjandjian Bagi Hasil dan UUU Pokok Agraria (land-reform).*

Produksi industri, perkebunan dan pertambangan yang umumnja masih tergantung pada impor barang² baku dan penolong sudah bekerdja djauh dibawah kapasitasnja yang normal. Mengingat kemunduran ekspor achir² ini dapat ditaksir bahwa Pemerintah untuk tahun 1962 hanya dapat menjediakan devisen untuk mengimpor bahan² baku dan penolong kurang lebih hanya 20% daripada kebutuhan normal. Menurut angka² Biro Pusat Statistik selama 9 bulan dalam tahun 1961 (Djauari s/d September) neratja perdagangan Indonesia tanpa minjak bumi menundjukkan defisit sebesar

Rp. 9,3 milyar atau rata² sebulan tidak kurang dari Rp. 1.03 milyar. Nilai ekspor tanpa minjak bumi selama 4 bulan pertama tahun 1962 merosot dengan 34% dibandingkan dengan tahun 1960 dan masih dibawah hasil tahun 1961. Dengan ini sudah dapat diperkirakan bahwa nilai ekspor tahun 1962 akan mengalami kemerosotan lagi. Padahal kebutuhan devisen untuk membiayai pembangunan, membayar hutang dan mengimpor beras bertambah besar.

Kemunduran dalam ekspor Indonesia banjak ditentukan oleh turunnya harga barang² ekspor penting seperti karet dan timah, sebagai akibat daripada permainan kaum monopolis Amerika Serikat dan persekutuan kaum monopolis Eropa Barat dalam Pasaran Bersama Eropa (PBE). Dalam waktu kurang dari dua tahun belakangan ini harga karet alam dipasar internasional telah merosot dengan keras. Menurut angka² resmi pada bulan Djuli tahun 1960 harga karet alam adalah 45.7 sen dolar Amerika Serikat, dalam bulan Djuli 1961 telah merosot menjadi 29.2 sen dolar AS per pon (lbs). Dalam tahun 1962 harga itu merosot lagi, yaitu bagi djenis Hard Flat Bark Crepe pada tanggal 24 Djuli 1962 menjadi 21 sen dolar AS dan rata² bagi semua djenis hanya 26 sen dolar AS per pon (lbs). Dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian² yang diderita oleh Indonesia, apabila dengan kemerosotan 1 sen dolar AS saja setiap pon (lbs) sudah berarti kerugian sebesar 15 djuta dolar AS setahun, berdasarkan ekspor setahun sebesar 750.000 ton. Ditambah pula volume ekspor karet semendjak tahun 1956 rata² dibawah 700.000 ton setahun.

Gedjala krisis ekonomi Indonesia yang makin meluas dan mendalam kita djumpai pula dalam bentuk² yang kongkrit dibidang pertanian dan perkebunan. Kemunduran produksi pertanian yang sangat serius sangat terasa akibatnya dalam persediaan bahan makanan yang pokok, yaitu beras. Produksi beras direntjanakan untuk tahun 1962 sebesar 10 djuta ton yang berarti akan terdapat surplus 150.000 ton. Tetapi kenyataan membuktikan, bahwa dalam tahun 1962 Indonesia masih harus

mengimpor kuranglebih 1.5 djuta ton beras dari luar-negeri. Berdasarkan kenyataan ini, maka sangat diragukan kebenaran pengumuman SSB bahwa produksi beras tahun 1962 mengalami kenaikan sampai 15%. Produksi gula pasir tahun 1962 tidak mentjapai rentjana dan malahan menurut perkiraan akan kurang dari produksi tahun 1961, yang sudah lebih rendah dibandingkan dengan tahun² sebelumnya.

Produksi pertanian serta perkebunan dan produksi pertambangan merupakan sumber penting dalam memenuhi kebutuhan barang² sandangpangan bagi Rakyat, dalam memetjahkan problem pembiayaan pembangunan, dalam memulihkan keadaan ekonomi dari kerusakan² akibat peperangan, yang kesemuanya ini merupakan masalah yang sangat berat pada dewasa ini. Industri Indonesia sekarang, yang sangat lemah dalam djenis dan djumlah, produksinya naik-turun sedjalan dengan madjundurnya ekspor barang² hasil pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagai sumber pembiayaan impor barang² baku dan penolong. Karena itu pula maka perkembangan industri dalam negeri yang mutlak diperlukan banjak tergantung pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Nilai produksi dibandingkan dengan modal yang ditanam disektor ini adalah djauh lebih besar karena dibandingkan dengan sektor industri ia tidak memerlukan penanaman modal yang sangat besar. *Adalah djalan yang se-baik²nya untuk menjadikan produksi pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagai dasar daripada perekonomian negeri kita, dari mana kita terutama mendapat biaja untuk mengindustrialisasi negeri. Tanpa memperkuat dasar ini tidak mungkin kita mengindustrialisasi negeri, dan tanpa industri yang kuat ekonomi kita tidak akan mempunyai tulang-punggung yang kuat.*

Pelaksanaan prinsip ini menghendaki dipadukannya dua tugas, yaitu tugas sektor agraria dan tugas sektor industri. Tugas mempertinggi produksi dibidang agraria dengan terutama melaksanakan setjara konsekwen UU Perdjudjian Bagi Hasil dan UU Pokok Agraria (land-

reform) dan tugas pembangunan industri, harus merupakan kesatuan tugas nasional yang berimbang dan tak terpisahkan satu sama lain.

Perhubungan kereta-api dan angkutan bermotor melalui djalan² raja mengalami kematjetan² sehingga sangat menghambat peredaran ekonomi diseluruh negeri. Kesimpang-siuran aparat distribusi menjebabkan pula seretnja perdagangan dalamnegeri. Birokrasi dalam berbagai instansi pemerintahan sivil maupun militer serta peraturan² yang ber-belit² mempersulit prosedur perdagangan. Akibat buruk daripada ini ialah kelambatan² atau kematjetan² dalam pengangkutan barang² sandang-pangan dan barang² untuk pembangunan projek-projek penting.

Gedjala lain yang tidak kalah seriusnja ialah timbulnja inflasi terbuka yang sangat merusak dan mengatjaukan ekonomi negeri kita. Menurut keterangan resmi, Anggaran Belandja negara tahun ini ditaksir akan mengalami defisit tidak kurang dari Rp. 40 miliar, belum termasuk pengeluaran² untuk keperluan perdjuaan pembebasan Irian Barat. Pada saat ini dapat diperkirakan bahwa peredaran uang sudah djauh lebih besar daripada keadaannja pada achir tahun 1961, yang pada waktu itu sudah berdjumlah lebih dari Rp. 64 miliar. Karena peredaran uang yang besar tidak diimbangi dengan kenaikan produksi, maka dengan sendirinja inflasi terbuka semakin menekan penghidupan Rakjat. Tindakan moneter berupa peraturan SIVA malahan memperlemah sektor produksi dan mendorong kenaikan harga.

Kepintjangan² sosial dan ekonomi tersebut bukanlah pertama-tama karena soal memulihkan keamanan dan perdjuaan pembebasan Irian Barat, tetapi terutama sekali adalah sebagai akibat daripada pengurusan yang salah (mismanagement) dibidang ekonomi-keuangan. Pengurusan yang salah dibidang ekonomi-keuangan ditandai oleh kenjataan² adanya pemborosan uang, tenaga dan alat², serta ongkos produksi yang tinggi sekalipun upah tetap rendah. Diantara orang² yang bertanggung-

djawab atas pengurusan (management) ekonomi-keuangan tidak sedikit terdapat kaum kapitalis birokrat dan orang² yang komunisto-phobi, buruh-phobi, Rakjat-phobi dan phobi-phobi lainnja, yang kerdjanja mengekang demokrasi dan menghambat perkembangan tenaga² produktif kaum buruh dan kaum tani.

Karena susunan organisasi ekonomi yang birokratis dan karena bertjokolnja kaum kapitalis birokrat maka sangat sulit pekerdjaan merombak pengurusan atau management yang buruk. Pengawasan yang demokratis dari massa ditekan, pembentukan Dewan² Perusahaan dan Dewan² Produksi dihambat. Hal² ini dengan tandas telah diperingatkan oleh Presiden Sukarno dalam Pidato *Tahun Kemenangan*. Sembojan atau program negara termasuk pula Amanat² dan Instruksi² yang baik² dibidang ekonomi dalam pelaksanaannja mengalami rintangan-rintangan atau disabot. Masih banyak orang² yang bertanggungjawab atas pengurusan ekonomi-keuangan, baik dipusat maupun didaerah-daerah, yang tidak berorientasi kepada Rakjat, kepada tenaga² produktif, yang pada pokoknja tidak mengabdikan kepada Amanat Penderitaan Rakjat.

Pengurusan yang tidak baik dibidang produksi, bidang distribusi dan bidang keuangan satu sama lain setjara timbal-balik memperburuk keadaan. Politik keuangan yang mau dengan gampang sadja menaikkan atau menambah djenis pajak² langsung atau tidak langsung memberatkan sektor produksi dan para konsumen. Produksi yang mundur membawa akibat buruk bagi keuangan negara.

Demikianlah antara lain gejala² yang tidak baik dalam pengurusan (management) ekonomi yang akibatnja sangat memberatkan beban Rakjat banyak.

Termasuk pula satu pengurusan yang salah (mismanagement) dibidang perdagangan luar negeri ialah tergantungnja kuranglebih 70% dari ekspor-impor kepada pasaran negara² imperialis Amerika Serikat dan Eropa Barat. *Apabila tidak ada tindakan² yang merombak setjara fundamental hubungan ekonomi luar negeri*

Indonesia, maka ekspor karet dan timah akan mengalami kemerosotan yang lebih keras lagi. Kedua bahan ini sudah meliputi hampir 50% dari seluruh ekspor Indonesia. Kaum monopolis Amerika Serikat dengan melalui stock-piling agencynya yang bernama "General Service Administration" (GSA) dan kaum monopolis dalam Pasaran Bersama Eropa sedang dan akan terus berusaha keras untuk mendjatuhkan harga barang² tersebut dipasar dunia. PBE adalah alat kaum imperialis untuk mempertahankan kekuasaan ekonomi imperialis dalam bentuk neo-kolonialisme di-negeri² A-A-A dan untuk memperkuat dasar ekonomi dari blok militer agresif NATO. Praktek² PBE sangat merugikan Indonesia sebagai negeri penghasil bahan mentah dan negeri yang industrinya masih belum berkembang maju.

Satu gejala lain lagi yang tidak baik dalam pengurusan ekonomi ialah penjelewanan dari Amanat² dan Instruksi² Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KTOE). Hal ini kita djumpai dalam bentuk apa yang dinamakan „kerjasama“ antara Pertamina dengan PANAM dalam eksploitasi minyak bumi. Kontrak penanaman modal asing setjara klasik dan setjara neo-kolonialisme sekaligus dengan dasar "contractorship" untuk waktu 30 tahun telah diadakan, dimana unsur kreditnja tidak nampak. Padahal bentuk kerjasama yang dikehendaki oleh KTOE adalah kredit berdasarkan *productionsharing*, dengan perkataan lain kredit yang dibayar dengan produksi atas dasar saling menguntungkan, dengan pemiliknya dan management Indonesia.

Keadaan pengurusan ekonomi mendjadi katjau dengan adanya pensalahgunaan wewenang pedjabat² tertentu baik sivil maupun militer. Mengutamakan perusahaan² bajangan daripada perusahaan² negara yang dipimpinnja menimbulkan kerugian² yang tidak sedikit bagi perusahaan² negara. Keterangan Panglima Angkatan Darat Major Djenderal A. Jani pada waktu pembukaan Akademi Pertanian Djenderal Sudirman di Purwokerto, bahwa anggota² tentara dalam lingkungan

djabatan sivil akan ditarik, apabila diminta oleh Departemen yang bersangkutan, menunjukkan adanya pengertian baik dikalangan pimpinan tentara.

Setelah menindjau keadaan ekonomi yang suram yang menimpa negara dan Rakyat, maka sudah waktunya untuk mengadakan tindakan² yang fundamental dibidang ekonomi. Tindakan² teknis-administratif atau finansial moneter pada waktu sekarang hanya merupakan tindakan tambal sulam yang tidak memberikan harapan dan tidak akan menjembuhkan ekonomi-keuangan yang luka parah seperti sekarang. Berdasarkan pertimbangan² ini, maka PKI dengan berpedoman pada Pidato Tahun Kemenangan Presiden Sukarno, demi mentjegah kemerosotan lebih lanjut daripada keadaan ekonomi-keuangan yang sudah sangat serius sekarang ini, mengusulkan segera diambil tindakan² sebagai berikut :

I. Rituling pada aparat² ekonomi-keuangan, perombakan pada susunan organisasi badan² ekonomi-keuangan yang birokratis. Orang yang bertanggungjawab atas pengurusan atau management ekonomi-keuangan dipusat sampai di-daerah², di Departemen² sampai di-perusahaan² negara, haruslah orang² yang Manipolis, patriotik, demokratis, djudjur, tjakap dan bertjita-tjita Sosialisme. Pemberantasan setjara kongkrit dan sistimatis segala komunisto-phobi, buruh-phobi, Rakyat-phobi dan phobi² lainnja dalam segala bentuk dan manifestasinja baik dikalangan sivil maupun dikalangan militer. Panitia Rituling Aparatur Negara yang sudah ada sekarang perlu diritul sehingga mendjadi Panitia Rituling yang demokratis dan representatif, didukung oleh partai² politik dan organisasi² massa, oleh golongan sivil dan militer.

II. Mempertjepat pembentukan Dewan² Perusahaan, Dewan² Produksi termasuk Dewan² Produksi Pertanian, Dewan² Pengawas Distribusi dan komunikasi, Dewan² Pengawas Impor-ekspor dll. setjara demokratis, agar dapat membantu dalam melaksanakan rentjana pem-

bangunan dan melakukan pengawasan yang demokratis atas semua kegiatan ekonomi dan keuangan negara.

III. Mendjamin hak² demokrasi bagi kaum buruh dan kaum tani serta seluruh Rakyat agar dapat bertanjut-taliwondo untuk menanggulangi krisis ekonomi sekarang. Untuk ini perlu dilaksanakan dengan segera penghapusan atau penurunan tingkat keadaan bahaya. Mendjamin perkembangan tenaga² produktif dibidang pertanian, perkebunan dan pertambangan dengan melaksanakan Undang² Perdjandjian Bagi Hasil dan Undang² Pokok Agraria serta mendjamin sjarat² materiil bagi para pekerdja. *Politik pembangunan harus didasarkan atas pengertian bahwa pertanian dan perkebunan adalah dasar, sedangkan industri adalah tulang-punggung untuk perkembangan ekonomi nasional.* Ini berarti kita harus memperhebat produksi dibidang pertanian dan perkebunan, dan dimana kita sudah memiliki tambang², djuga memperhebat produksi pertambangan.

IV. Merehabilitasi dan memperbaiki alat² produksi dan komunikasi didarat, laut dan udara, dan berangsurngsur mengadakan modernisasi setjara berentjana, sesuai dengan kemampuan modal, alat dan tenaga.

V. Mengubah politik perdagangan luarnegeri Indonesia dengan sedjauh mungkin memperluas volume dan nilai perdagangan luarnegeri dengan negeri² Sosialis untuk dapat mengelakkan akibat² buruk daripada krisis² ekonomi negeri² kapitalis, termasuk akibat buruk daripada PBE. Sedjalan dengan usaha mengubah politik perdagangan luarnegeri ini, maka harus diusahakan agar ekspor-impor barang² penting benar² dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah.

VI. Melawan dengan teguh penjelewengan kekanan, jaitu ketjenderungan untuk „melakukan kerdjasama teknik dan ekonomi” dengan kaum imperialis yang hakekatnja adalah bentuk² neo-kolonialisme, baik pena-

naman modal setjara klasik maupun dalam bentuk baru seperti sistim "contractor". Neo-kolonialisme Pasaran Bersama Eropa (PBE) yang merugikan ekonomi negara² A-A-A harus dilawan dan Pemerintah perlu mengadakan persiapan untuk membahas masalah neo-kolonialisme dikonferensi A-A ke-II yang akan datang, a.l. dengan memasukkan soal PBE sebagai salahsatu atjara.

VII. Politik keuangan harus mengabdikan kepada produksi dan tidak sebaliknya produksi dikorbankan karena politik keuangan yang salah, seperti tindakan moneter berupa peraturan SIVA. Penggunaan devisa harus dilakukan setjara efektif dengan mengutamakan terpenuhinja pembangunan dibidang produksi. Politik keuangan yang hanya berketjimpung dibidang fiskal yang setjara langsung dan tidak langsung memberatkan Rakyat harus dihentikan dan lebih mengutamakan penghasilan dari perusahaan² negara.

Dengan menjalankan Api Trikora sehebat-hebatnja, dengan memperkuat persatuan nasional yang berporoskan Nasakom, dengan melaksanakan setjara konsekwen Pidato *Tahun Kemenangan* Presiden Sukarno, kesulitan ekonomi sekarang akan dapat ditanggulangi dengan sukses. PKI yakin bahwa dengan terus menempuh djalan Rakyat maka semua kesulitan termasuk kesulitan ekonomi akan dapat diatasi.

Madju terus dengan semangat Trikora menanggulangi soal ekonomi!

Ritul aparatur ekonomi untuk mengatasi krisis sandangpangan!

Djakarta, 10 Oktober 1962.

BUSINESS NEWS :

KEADAAN PEREKONOMIAN SEKARANG

Ada baiknya kita berhenti sebentar dan meninjau keadaan perekonomian kita sekarang ini. Partai Komunis Indonesia berpendapat bahwa kita sekarang ada dalam keadaan "open inflation".

Kiranya ini adalah suatu pernyataan yang agak berlebihan. Sebab suatu "open inflation" adalah suatu keadaan dimana inflation telah mengamuk setjara sangat intensif dan tak dapat dikendalikan lagi.

Suatu keadaan dimana harga² dari semua barang² naik terus-menerus hampir saban hari dengan tidak kelihatan kapan berhentinja.

Memang kalau kita melihat harga² itu selama misalnja 10 tahun djadi dalam djangka waktu agak pandjang ada betulnja bahwa harga² dari semua barang² terus sadja naik dan sekarangpun djuga belum ada djaminan bahwa kenaikan harga² itu tidak akan mulai lagi dalam waktu² yang akan datang.

Akan tetapi selama 10 tahun ini kenaikan harga² itu tidak berdjalan terus-menerus, melainkan sebentar naik sebentar berhenti, naik lagi berhenti lagi dan begitulah seterusnya.

Kalau kita gambarkan maka inflasi kita ini seperti naik tangga rumah jaitu melondjak keatas lalu datar sementara waktu, lalu melondjak lagi keatas.

Inflasi kita ini sebetulnja adalah inflasi tertekan ("repressed inflation") tetapi karena tekanan inflasi terus-menerus ada, chususnja berupa defisit anggaran belanja negara disamping kemerosotan produksi maka djika diberi alasan atau kesempatan untuk naik maka harga setjara se-konjong² dan berbarengan untuk hampir se-

mua barang² dan djasa² melondjak keatas setjara hebat dan terasa sekali. Tetapi kenaikan mendadak dan hebat ini segera disusul oleh kestabilan baru sekalipun untuk sementara dan pada tingkat harga yang lebih tinggi.

Memang benar bahwa dalam keadaan yang demikian ini Rakyat ketjil mendjadi korban dan chususnja para buruh, pegawai negeri, pensiunan dan lain² golongan yang penghasilannja dalam djumlah rupiah tetap. Memang upah dan gadji djuga ikut naik, tetapi naiknja lambat dan tidak sepadan dengan naiknja harga². Achirnja upah buruh itu djauh terkebelakang dibanding dengan kenaikan harga² yang dibutuhkan, sehingga dirasakan makin lama makin kurang penghasilannja.

Akan tetapi anehnja yang diusulkan oleh kaum Komunis sebagai tindakan² perbaikan tidaklah samasekali menggambarkan bagaimana dan kearah mana dapat diharapkan ada perbaikan. Se-olah² pada pokoknja yang diusulkan itu ialah penggantian orang² yang berkuasa pada aparaturnegera, menghapuskan keadaan bahaya dan membentuk lembaga² masjarakat baru dimana mereka dapat memainkan peranan yang penting. Sudah tentu usul² ini adalah penting bagi yang bersangkutan akan tetapi apa djaminannja bahwa keadaan perekonomian akan mendjadi baik karenanja.

Kita semua sudah tahu bahwa ada mismanagement, distribusi perlu diperbaiki, produksi perlu dinaikkan dlsb. Tetapi sayang sekali kita tidak bisa menemukan dalam usul² itu suatu konsepsi yang bisa diterima dapat memperbaiki itu semua.

Keadaan sekarang ini memanglah bukan keadaan inflasi terbuka. Bahkan keadaan sekarang ini adalah aneh sekali. Dalam waktu harga² meningkat maka kita mengalami suatu keadaan depressi. Keadaan perekonomian kita lesu, tidak bersemangat, tidak banjak kegiatan.

Padahal harga² berada pada tingkat yang sangat tinggi, akan tetapi transaksi tidak ramai, djualbeli hanja sekedarnja sadja. Harga dipasang tinggi tetapi pembelinja tidak bersemangat, tidak ter-buru² nafsu atau ketakutan kalau² harga akan naik lebih tinggi. Sebaliknya

pendjualan djarang ada djika orang benar² mau beli dan rupa²nja enggan untuk melepaskan barangnja se-olah² takut kalau² nanti susah lagi tjari barang.

Apa sebabnja demikian? Di Indonesia sekarang ini ada dua sumber terpenting jang memberikan denjutan bergeraknja perekonomian. Pertama adalah ekspor. Kalau ekspor kendor, maka kendorlah pula perdagangan, kendorlah perindustrian dan kendor pula pengangkutan dst. Djustru sekarang ini sesudahnja agak lama ekspor terus-menerus agak repot, maka kegiatan ekspor makin mendjadi kurang. Rupa² sebabnja, tetapi kenjataanja ekspor tidak bersemangat maka devisapun mendjadi kurang adanja.

Sumber denjutan djantung perekonomian kita jang penting jalah sektor pemerintahan. Pemerintah belakangan ini se-olah² sangat ber-hati² dalam pengeluaran² keuangan, karena usahanja untuk mendjaga supaya inflasi djangan men-djadi². Hal ini terasa sekali dikalangan swasta dimana dirasakan betapa sulitnja mendapat kredit atau menerima bajaran² dari Pemerintah. Misalnja terasa sekali betapa seretnja pembayaran kepada pemborong² jang sudah menjelesaikan sebagian dari pekerdjaan. Selain dari itu djuga politik kontraksi uang jang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap bank² swasta teras sekali, sehingga bank² swastapun bekerdja sangat ber-hati² dalam pembeajaan² usaha swasta.

Demikianlah pada waktu sekarang ini se-olah² semua orang menunggu, tidak banjak bergerak karena se-olah² ragu² dan tidak mendapat alasan atau perangsang untuk bergerak.

Djakarta, 13 Oktober 1962.

REDAKTUR EKONOMI HARIAN RAKJAT :

INFLASI TERBUKA ATAU TIDAK ?

Tulisan "Business News" (BN) tertanggal 13 Oktober jang lalu tentang „Keadaan Perekonomian Sekarang", sebagai reaksi terhadap masalah menanggulangi soal ekonomi dengan semangat Trikora jang dikemukakan oleh Politbiro CC PKI dalam Pernyataannja tanggal 12 Oktober jang lalu, ternjata hanja berkisar pada 2 soal, jaitu :

1. BN tidak sependapat dengan PKI bahwa sekarang ini telah timbul gedjala inflasi terbuka jang sangat merusak dan mengatjaukan ekonomi negeri kita.
2. BN berpendapat bahwa dalam 7 usul jang dirumuskan setjara pokok² itu tidak terdapat satu konsepsi jang kongkrit jang menurut pendapat BN, dapat memperbaiki keadaan ekonomi-keuangan jang parah seperti sekarang ini.

Inflasi Terbuka

Menurut pengertian jang lazim diterima dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah penamaan untuk keadaan jang setjara moneter menggambarkan merosotnja nilai tukar uang kertas (rupiah) terhadap sedjumlah barang-dagangan dan djasa dalam peredaran, dalam masjara-kat. Dan menurut hukum pasar, kelebihan uang kertas dalam peredaran membawa akibat kenaikan harga barangdagangan dan djasa. Kongkritnja nilai (dajabeli) rupiah djatuh terhadap nilai seluruh barangdagangan dan djasa.

Kenaikan harga itu sendiri, disatu pihak mendorong nafsu untuk mentjetak uang dalam rangka mentjukupi

kebutuhan yang makin meningkat akan uang kertas yang merosot nilainya untuk ditukarkan dengan barang-dagangan dan jasa yang meningkat harganya. Dilain pihak rupiah yang sedang merosot nilainya menimbulkan kekuatiran pada golongan² dalam masyarakat, sehingga terdapat ketjenderungan untuk membeli mas, barang-dagangan, valuta asing dsb. Tindakan ini dengan sendirinya akan menambah ketjepatan dialannja peredaran uang. Tegasnja, inflasi itu sendiri menjadi sebab daripada kelanjutan inflasi yang seterusnya. Djadi kenaikan harga yang tidak terkendalikan yang membawa akibat buruk dalam produksi, distribusi dan peredaran barang adalah tjiri pokok daripada inflasi dalam kehidupan ekonomi yang liberal.

Pengalaman selama ini menundjukkan bahwa setiap pemerintah yang mau mendjalankan tugasnja sesuai dengan kepentingan Rakjat, akan mengambil tindakan² moneter maupun ekonomi yang dimaksudkan untuk menekan inflasi dan mentjegah kenaikan harga, sehingga nilai-tukar uang itu tetap menjadi stabil. Dan yang menentukan dajabeli rupiah adalah harga barang-dagangan itu sendiri (produksi) dan penjaluran distribusi barangdagangan. Ini berarti bahwa Pemerintah harus dapat mengendalikan politik pembentukan harga dan politik distribusi. Djika pembentukan harga dan distribusi tidak dipimpin oleh Pemerintah, tetapi terlepas dari tangan Pemerintah, maka tidak ada artinja berbitjara tentang „inflasi tertekan” atau “repressed inflation”. Kenyataan sudah membuktikan kebenaran konstataasi Politbiro CC PKI bahwa sekarang ini telah timbul gedjala inflasi terbuka. Buktinja, disamping adanya harga Pemerintah, terdapat djuga harga bebas dan spekulatif. Kedua, disamping adanya distribusi barang kebutuhan pokok, terdapat djuga penjaluran barang setjara spekulatif. Hal ini sudah tjukup membuktikan bahwa Pemerintah tidak mampu mendjalankan apa yang disebut politik “repressed inflation” atau “inflasi tertekan”.

Jang perlu dikemukakan djuga adalah sifat daripada inflasi di Indonesia sendiri. Tjara² yang digunakan untuk mendekati masalah inflasi di Indonesia adalah tjara pendekatan terhadap inflasi yang timbul di-negeri² kapitalis yang sudah maju. Indonesia sebaliknya adalah negeri yang belum merdeka penuh, keluar ekonominja masih tergantung kepada dunia kapitalis, dan kedalam hubungan produksi masih bersifat setengah feodal. Djadi apa yang dikatakan aneh oleh BN, jaitu „dalam waktu harga² meningkat maka kita mengalami suatu keadaan depressi”, „lesu”, „tidak bersemangat, tidak banjak kegiatan” dsb., dsb.

Menurut pengertian yang lazim berlaku dinegeri kapitalis, maka sebagaimana dirumuskan oleh BN, „inflasi terbuka” atau “open inflation” adalah suatu „keadaan dimana inflasi telah mengamuk dengan sangat intensif dan tidak terkendalikan lagi, suatu keadaan dimana harga semua barang² naik terus-menerus hampir saban hari dengan tidak kelihatan kapan berhentinja”. Keadaan sematjam ini seperti dirumuskan oleh BN dalam tulisannya itu, sebetulnja sudah bukan inflasi lagi akan tetapi sudah dapat dikatakan „permulaan daripada staatsbankrut”. Keadaan sematjam ini pernah kita lihat dulu misalnja di Djerman pada achir perang dunia I dan pada saat² setelah perang itu. Ini adalah salahsatu bentuk daripada „staatsbankrut”, akan tetapi suatu hal yang tidak pernah kita djumpai dalam kamus kaum kapitalis monopoli atau kaum fasis, bahwa djuga ada bentuk² lain daripada „staatsbankrut” atau puntjak daripada krisis umum kapitalisme itu. Jaitu massa-ontslag setjara besar²an, penghisapan yang luarbiasa hebatnja atas Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan tani, dan penindasan serta pengekangan setjara mutlak atas hak² kebebasan demokratis daripada Rakjat pekerdja. Hal ini telah dilakukan oleh kaum fasis Djerman dibawah pimpinan Hitler selama ber-tahun².

Kami sependapat dengan BN bahwa keadaan di Indonesia memang tidak dapat dikarakterisasi dengan apa yang kami namakan „staatsbankrut” itu. Akan tetapi

kami menamakan keadaan sekarang dimana harga barang-barang kebutuhan pokok dalam beberapa bulan saja sudah sangat membubung, dan bersamaan dengan itu dajabeli Rakjat pekerdja sudah sangat merosot tidak lagi dengan istilah „inflasi tertekan“, akan tetapi sudah dengan istilah „inflasi terbuka“. „Inflasi tertekan“ menurut pendapat kami sudah ber-tahun² lamanja kita alami, dan belakangan ini sudah memuntjak pada tingkatan yang lebih serius lagi.

Kalau kita ikuti angka² resmi saja dari Pemerintah yang djuga dikutip dalam Pernyataan Politbiro CC PKI, maka djelas, bahwa selama tujuh tahun jaitu dari 1953 sampai 1960, indeks harga barang² kebutuhan pokok atau indeks kebutuhan hidup di Djakarta dalam tahun 1960 adalah 388 berdasarkan indeks tahun 1953 adalah 100. Akan tetapi indeks dalam tahun 1962 sudah menjadi 1261 dibandingkan dengan indeks 100 dalam tahun 1953. Djadi selama 2 tahun kenaikan indeks sudah menjadi $1261 : 388 = 3,25$ lipat atau hampir sama dengan kenaikan indeks dalam 7 tahun jaitu 3,88 kali lipat (388 dalam tahun 1960 dibandingkan dengan 100 dalam tahun 1953). Dari fakta² ini njatalah bahwa ada alasan yang tjukup kuat dan masukakal djika kami tidak lagi mengkonstatasi keadaan sekarang ini sebagai „inflasi tertekan“ akan tetapi sudah sebagai „inflasi terbuka“.

Djalankeluar Dari Kesulitan² Ekonomi

Sebelumnja mempeladjar dengan sungguh² dan mendalam isi Pernyataan Politbiro CC PKI, rupa²nja BN sudah terburu nafsu untuk menuduh bahwa „anehnja yang diusulkan oleh kaum Komunis sebagai tindakan perbaikan tidaklah samasekali menggambarkan bagaimana dan kearah mana dapat diharapkan adanya perbaikan“.

Dalam Pernyataan tersebut terang dikemukakan 7 (tujuh) usul pokok yang satusamalain tidak dapat dipisah²kan. BN dengan sengaja menjembunjak usul²

lainnja dari PKI dengan maksud sudah tentu untuk menimbulkan kesan kepada umum se-olah² PKI hanya menghendaki retuling dan perombakan aparatur ekonomi dan keuangan saja, sehingga dengan begitu sadar atau tidak sadar BN mengadu-domba antara kita sama kita satusamalain. Padahal PKI sudah lama berpendirian, bahwa tindakan² teknis-administratif-moneter saja tidaklah mungkin untuk dapat mengatasi keadaan sekarang ini. Tindakan² yang terutama dikehendaki PKI ialah memperbesar produksi pertanian dan perkebunan dengan djalan pengembangan tenaga² produktif di bidang² itu melalui perluasan hak² demokratis, melaksanakan landreform dengan konsekwen, pembentukan badan² atau dewan² perusahaan, dewan² produksi, dll. Disamping itu PKI menghendaki adanya dewan² pengawas distribusi, dewan² pengawas impor dan ekspor, sebagai bentuk² pengawasan atau „social control“ atas djalannja produksi dan distribusi. Ini semua adalah sesuai dengan fikiran² yang maju dan kongkrit dari Presiden Sukarno yang telah dirumuskan dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannja serta Amanat „Tahun Kemenangan“. Sudah tentu usul² pokok PKI dapat diperintji lebih lanjut dalam rumusan² yang lebih kongkrit. Sebaliknya dari tulisan BN itu kami telah dapat menarik kesimpulan bahwa BN samasekali tidak tampil dengan usul² yang prinsipil, usul² yang tidak hanya menguntungkan kaum pengusaha swasta saja, akan tetapi djuga menguntungkan massa Rakjat pekerdja yang ber-puluh² djuta djumlahnja jaitu terutama kaum buruh dan kaum tani.

Djakarta, 28 November 1962.

I S I

Pengantar	3
<i>Politbiro CC PKI</i> — Madju terus dengan semangat Trihora menanggulangi soal ekonomi !	5
<i>Business News</i> — Keadaan perekonomian sekarang	16
<i>Redaktur Ekonomi „Harian Rakjat“</i> — Inflasi Ter- buka atau tidak ?	19